

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor keuangan memang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar dibandingkan sektor lainnya. Peningkatan PDB terbesar di sektor keuangan tercatat sebesar 5,11%, dengan merampingkan layanan konsumen seperti pendapatan bunga dari pinjaman, sektor keuangan dapat dioptimalkan untuk memperkuat perekonomian Surbakti et al., (2022). OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengatur prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) di perusahaan melalui Peraturan OJK (POJK) terkait Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mencakup lima aspek utama yaitu hubungan perusahaan dengan pemegang saham, fungsi dan peran Dewan Komisaris, fungsi dan peran Direksi, serta transparansi dan keterbukaan informasi dengan prinsip-prinsip GCG yang diatur meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Penilaian kinerja perusahaan terhadap keberhasilan keuangan perusahaan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat yang memiliki kepentingan lebih besar di dalamnya. Laporan keuangan yang selalu dilaporkan harus menunjukkan nilai akhir dari proses akuntansi dengan tujuan menjabarkan kondisi akhir perusahaan Darya (2020). Kinerja perusahaan ini penting bagi berbagai pemangku kepentingan dan investor dalam membuat keputusan keuangan perusahaan yang

efektif, seperti keputusan investasi dan penilaian kinerja Fajarwati & Witiastuti (2022).

Tata kelola perusahaan dapat diukur dengan berbagai mekanisme. Kinerja perusahaan yang baik atau tidak dapat dilihat dari penerapan tata kelola pada perusahaan tersebut Sari (2021). Ukuran dan independensi dewan direksi memberikan pengaruh dan berdampak pada kinerja dan performa yang akan dicapai oleh perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang diatur dalam POJK Nomor 20/POJK.04/2015. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam konsistensi penerapan standar tersebut di berbagai perusahaan.

Pelanggaran tata kelola perusahaan dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan, namun masih saja banyak perusahaan publik yang mengalami kasus pelanggaran tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan perbankan yang lemah terutama dalam pengawasan pengelolaan dana nasabah dan penyaluran kredit, dapat menyebabkan kinerja keuangan perusahaan menurun. Selain itu penurunan kinerja keuangan perusahaan juga dapat disebabkan oleh adanya tekanan politik terhadap jajaran komisaris dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sementara lemahnya sistem pengawasan internal yang semestinya dijalankan oleh komite audit juga memungkinkan terjadinya penyimpangan tanpa deteksi dini.

Pemegang saham dengan kepemilikan yang besar memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan akhir. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memengaruhi hubungan antara tata kelola dengan kinerja perusahaan, persentase saham yang dimiliki pemilik saham dapat memperlemah penerapan tata kelola perusahaan dan akhirnya menurunkan kinerja perusahaan Sarpong-Danquah dkk (2022). Selain struktur kepemilikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen dan akan berakibat pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Komisaris independen harus bebas dari pengaruh atau kepentingan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan mereka. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen memiliki tugas utama untuk mengawasi kinerja Direksi, memastikan kepatuhan hukum, dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Komite audit dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite audit berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite audit ini harus terdiri dari anggota yang independen,

yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, untuk menghindari benturan kepentingan.

Struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua kategori yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, tergantung pada persentase saham di perusahaan. Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan, sementara kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, atau dana investasi. Kepemilikan Manajerial mengacu pada saham yang dimiliki oleh individu-individu yang terlibat dalam manajemen perusahaan, seperti direksi, komisaris, atau karyawan senior. Kepemilikan ini dapat berfungsi sebagai insentif bagi manajer untuk berkinerja baik dan menjaga kepentingan perusahaan karena mereka juga memiliki saham yang nilainya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan.

Kepemilikan Institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi keuangan yang mengelola dana orang lain. Institusi ini dapat berupa dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi, atau dana investasi. Kepemilikan institusional sering dianggap sebagai bentuk pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena institusi ini memiliki sumber daya dan kepentingan untuk mengawasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dihormati.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa 69 persen bank dalam negeri masih melanggar aturan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola

perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam PBI No.4/2006 yang diperbarui dengan PBI No.14/2006."Terutama pada bank-bank kecil swasta," kata Deputi Gubernur BI Siti Fadrijah. PBI no 14/2006 menyatakan dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris Independen dimana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sementara itu pasal mengenai rangkap jabatan tertera dalam Pasal 7 yang menyatakan anggota dewan komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat Eksekutif pada satu lembaga atau perusahaan keuangan. Asal tersebut juga mengungkapkan Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan anggota direksi.

Pelanggaran tata kelola pada bank swasta nasional dapat berupa kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran dalam operasional bank. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur, praktik manajemen risiko yang lemah, atau bahkan praktik korupsi.

Penerapan GCG yang baik sangat penting bagi bank swasta nasional untuk menjaga kepercayaan nasabah, menarik investor, dan memastikan keberlangsungan bisnis.

Pelanggaran GCG dapat berdampak negatif pada reputasi bank, stabilitas sistem keuangan, dan bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan GCG pada bank dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Namun, bank swasta juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan GCG secara sukarela dan proaktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1 Apakah dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 2 Apakah komite audit independen dapat berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 3 Apakah kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 4 Apakah kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dewan komisaris independen terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak komite audit independen terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kepemilikan institusional terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan tentang dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan tentang penerapan dan dampak *good corporate governance* di perbankan yang melibatkan peran dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktika

- a. Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan

evaluasi bagi internal dan eksternal dalam mengetahui tentang dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya pada perusahaan sektor keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.

- b. Bagi peneliti memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu dapat mengasah kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa komponen, dengan setiap segmen mengandung penjelasan yang mendukung masing-masing bab. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini, disampaikan ringkasan yang menyajikan deskripsi tentang penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai penelitian sebelumnya sebagai perbandingan, landasan teori yang menjadi acuan

penelitian, keterkaitan antara variabel, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini akan menjelaskan tentang desain penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai subyek, bagaimana data yang sudah terkumpul diolah, teknik analisis data dan menjelaskan tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis data, kemudian kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, juga terdapat saran atau masukan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian yang dilakukan berikutnya dapat menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya.